

**LAPORAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI  
DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2012**



**KAJIAN DAMPAK PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN  
DI PROVINSI GORONTALO**

**Ketua**  
**Wawan Tolinggi, SP, M.Si**

**Anggota**  
**Yanti Saleh, S.P, M.Pd**  
**Ahmad Fadhli, S.E,M.Si**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
OKTOBER, 2012**

## ABSTRAK

Program Desa Mandiri Pangan adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kerawanan pangan dan gizi masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi keberdayaan masyarakat miskin perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal, untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bolemo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango pada bulan Mei-Oktober 2012. Desain Penelitian ini metode survei dengan menggunakan data sekunder dan primer, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil pengamatan langsung, melalui *focus group discussion* (FGD), wawancara dan pengisian kuesioner dengan pihak-pihak terkait. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa alat analisis yaitu: analisis deskriptif, analisis kelembagaan, analisis *Comparative Performance Index* (CPI) dan analisis LFA (*Logical Framework Analysis*).

Hasil analisis menunjukkan bahwa Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo meliputi 4 tahapan pelaksanaan yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian yang menggunakan 6 instrumen dasar evaluasi yaitu instruktur, manajemen kelompok, permodalan, sarana prasarana, tenaga kerja dan teknologi dapat memberikan penilaian terhadap desa sukamaju sebagai peringkat pertama dan desa batu keramat peringkat kedua dan desa dunggala peringkat ketiga yang merasakan dampak program desa mandiri pangan. Sistem kelembagaan melibatkan kegiatan lintas sektor yang dimulai dari Tim Pangan Desa, Kepala Desa, Camat, Pokja Desa Mapan, Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan. Memberikan manfaat yang dapat meningkatkan pangan dan gizi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Sedangkan hasilnya (*outcomes*) yaitu tersedianya modal usaha, sarana dan prasarana semakin lengkap dan berkurangnya masyarakat miskin, sementara *output* (keluaran) yang diperoleh adalah strategi pengembangan usaha yang terencana dan peningkatan produktivitas. Serta kegiatan (*activities*) yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan yang intensif, menjalin kerjasama dengan Universitas, Lembaga Keuangan (Bank) dan swasta

Kata kunci : *Dampak , Program Desa, Mandiri Pangan (mapan),*

**LEMBAR PENGESAHAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI**

1. Judul Penelitian : Kajian Dampak Program Desa Mandiri Pangan Provinsi Gorontalo
2. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap : Wawan K. Tolinggi, SP, M.Si
  - b. Jenis Kelamin (L/P) : Laki-Laki
  - c. NIP/NIK/ID lainnya : 198705292005011001
  - d. Jabatan Struktural : Sekretaris Pusat Pengembangan Kegiatan Mahasiswa UNG
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor
  - f. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
  - g. Fakultas/Jurusan : Pertanian/ Agribisnis
  - h. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian
  - i. Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No 6 Kota Gorontalo
  - j. No. Telepon/Faks : (0435) 827038/(0435) 827038
  - k. Alamat Rumah : Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo
  - l. No. Telp/Faks/HP : 081356184041
  - m. E-mail : *wawan\_tolinggi@yahoo.com*
3. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan seluruhnya
4. Pembiayaan : Rp. 21.650.000 (Dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Mengetahui,  
Dekan Pertanian

Gorontalo, Oktober 2012  
Ketua Peneliti,

Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, MP  
NIP.196507111991031003

Wawan Tolinggi, SP, M.Si  
NIP. 198705292005011001

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Fitriyane Lihawa, M.Si  
NIP. 196912091993032001

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Akhir Penelitian Pengembangan Program Studi dapat diselesaikan.

Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo sudah dimulai sejak tahun 2006, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di desa rawan pangan dengan fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui empat tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian. Melalui program tersebut diharapkan masyarakat desa rawan pangan akan kembali mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif setiap harinya.

Atas dasar inilah kami peneliti dari program studi agribisnis (sosial ekonomi pertanian) tertarik untuk mengkaji sejauh mana dampak dari program desa mandiri pangan yang dilaksanakan di Provisni Gorontalo

Akhirnya Tim Peneliti Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNG menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas inisiatif dari Lembaga Penelitian-UNG atas pelaksanaan penelitian ini. Semoga Laporan penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan program Desa Mandiri Pangan ditahun yang akan datang.

Gorontalo, Oktober 2012

**Tim Peneliti**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Urgensi Penelitian .....	3
BAB II. KERANGKA TEORI.....	5
2.1 Tinjauan Pustaka .....	5
2.2 Kerangka Berpikir (Bagan Alir Penelitian) .....	9
BAB III. METODE PENELITIAN.....	10
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	10
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	10
3.3 Penarikan Sampel Desa Mandiri pangan .....	10
3.4 Metode Analisis Data.....	10
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	15
4.1. Gambaran Umum Desa Mandiri Pangan Provinsi Gorontalo.....	15
4.2. Identitas Sampel Desa Mandiri Pangan .....	18
4.3 Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan .....	24
4.4. Identifikasi Dampak Program Desa Mandiri Pangan.....	31
4.5. Penilaian Dampak Program Desa Mandiri Pangan.....	35
4.6 Sistem Kelembagaan Desa Mandiri Pangan .....	37
4.7 <i>Logical Framework Analysis</i> .....	42
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	47
5.1. Kesimpulan .....	47

5.2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	49
LAMPIRAN.....	50

## DAFTAR TABEL

No.	Teks	Hal
1.	Desa Mandiri Pangan Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Gorontalo, Tahun 2006 – 2010 .....	17
2.	Sampel Penelitian Desa Mandiri Pangan, Tahun 2012.....	19
3.	Jumlah Penduduk Desa Sukamaju Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	20
4.	Jumlah Penduduk Desa Sukamaju Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...	21
5.	Jumlah Penduduk Desa Dunggala Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	23
6.	Jumlah Penduduk Desa Dunggala Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...	24
7.	Tahap Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan Di Provinsi Gorontalo .....	30
8.	Instrumen Dasar Evaluasi Program Desa Mapan, Tahun 2012 .....	31
9.	Matrkis Awal Penilaian Dampak Program Desa Mapan, Tahun 2012 ..	35
10.	Matrkis Hasil Transformasi Teknik Perbandingan Indeks Kinerja Penilaian Dampak Program Desa Mapan, Tahun 2012 .....	36
11.	Fungsi dan Peran Masing-Masing Level Kelembagaan .....	37
12.	Kelembagaan Yang Berperan Dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan Di Provinsi Gorontalo .....	41
13.	<i>Logical Frame Matrix</i> .....	46

## DAFTAR GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Teks</b>	<b>Hal</b>
1.	Bagan Alir Penelitian .....	9
2.	Level Analisis Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya .....	12
3.	Tahap Perencanaan Pengelolaan Berbasis LFA.....	14
4.	Jumlah Desa Mandiri Pangan per Kabupaten di Provinsi Gorontalo, Tahun 2006 - 2012 .....	15
5.	Jumlah Program Desa Mandiri Pangan Per Tahun Anggaran Tahun di Provinsi Gorontalo, 2006 - 2012.....	18

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No.</b>	<b>Teks</b>	<b>Hal</b>
1.	Kuisoner Desa Mandiri Pangan .....	50
2.	FGD Desa Mapan.....	54
3.	Dokumentasi Penelitian .....	55
4.	Curriculum Vitae Peneliti .....	57
5.	SK Penetapan Peneliti .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ketersediaan pangan secara makro tidak menjamin tersedianya pangan ditingkat mikro (rumah tangga penduduk). Produksi pertanian di lokasi tertentu pada musim panen, mengakibatkan terjadinya konsentrasi ketersediaan pangan di daerah produksi selama musim panen. Pola konsumsi yang relatif sama diantara individu, antar waktu dan antar daerah, mengakibatkan adanya masa-masa paceklik dan lokasi-lokasi defisit pangan. Dengan demikian, mekanisme pasar dan distribusi pangan antar lokasi dan antar waktu dengan mengandalkan stok pangan, dapat berpengaruh terhadap kesetimbangan antara ketersediaan dan konsumsi, serta berdampak pada harga yang terjadi di pasar. Faktor harga juga terkait dengan daya beli rumah tangga terhadap pangan. Meskipun bahan pangan tersedia di pasar, namun jika harganya tinggi serta daya beli rumah tangga rendah akan mengakibatkan rumah tangga tidak dapat mengakses bahan pangan yang ada di pasar. Kondisi ini memicu timbulnya kerawanan pangan.

Kebijakan dibidang ketahanan pangan merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, strategi dalam membangun sistem ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada peningkatan sumberdaya manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI (2010), pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas nasional. Hal ini difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan yaitu dengan melaksanakan program Desa Mandiri Pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada implementasi program. Untuk mengukur keberhasilan program desa mandiri pangan, maka sangat penting untuk melakukan analisis mengenai dampak desa mandiri pangan. Untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo sudah dimulai sejak tahun 2006, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di desa rawan pangan dengan fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui empat tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian. Melalui program tersebut diharapkan masyarakat desa rawan pangan akan kembali mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif setiap harinya. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan, serta tercapainya kemandirian masyarakat.

Tujuan program Desa Mandiri Pangan adalah untuk meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi (mengurangi kerawanan pangan dan gizi) masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan (BKP, 2011). Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi. Dalam pelaksanaannya, program Desa Mandiri Pangan difasilitasi dengan masukan antara lain: instruktur, pendampingan dalam bidang manajemen kelompok dan usaha serta teknis, bantuan permodalan, sarana dan prasarana, tenaga kerja serta teknologi. Berbagai masukan tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

seperti pemberdayaan masyarakat (pendampingan, pelatihan, fasilitasi dan penguatan kelembagaan), harmonisasi sistem ketahanan pangan dan pengembangan keamanan pangan serta antisipasi maupun penanggulangan kerawanan pangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sejauhmana efektivitas pelaksanaan dari program desa mandiri pangan yang sudah dilaksanakan di Provinsi Gorontalo.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian Kajian Dampak Program Desa Mandiri Pangan bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi keberdayaan masyarakat miskin perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal, untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat.

### **1.4 Urgensi Penelitian**

Adapun urgensi (keutamaan) dari penelitian Kajian Dampak Program Desa Mandiri Pangan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya program desa mandiri pangan karena desa adalah unsur pemerintahan yang paling dekat dengan kebutuhan rumah tangga.
2. Berdasarkan hasil penelitian Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Provinsi Gorontalo tahun 2011, mengidentifikasi 3 daerah di Provinsi Gorontalo yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango termasuk kategori daerah rawan pangan, oleh karena itu perlu kajian mendalam dampak program desa mandiri pangan yang di laksanakan di daerah tersebut.
3. Belum adanya kajian dan evaluasi spesifik tentang program desa mandiri pangan di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2006 program tersebut dilaksanakan.
4. Kajian dampak program desa mandiri pangan dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan kepada Pemerintah daerah dalam proses pengambilan

keputusan untuk menyusun kebijakan sistem ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas*) Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 100 kabupaten rawan pangan yang tersebar di 23 propinsi, dengan rincian 30 kabupaten prioritas pertama, 30 kabupaten prioritas kedua dan 40 kabupaten prioritas ketiga. Kelompok rawan pangan prioritas tersebut menunjukkan kabupaten-kabupaten yang harus mendapatkan prioritas khusus dalam penanganan masalah kerawanan pangan. Sedangkan sisanya (165 kabupaten) masuk dalam kelompok tahan pangan. Menurut BKP Kementerian Pertanian dalam Ratnasari dan Prishardoyo (2009), Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat, atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya. Suatu daerah dikatakan rawan pangan dapat diukur dengan banyaknya jumlah rumah tangga prasejahtera yang relatif masih banyak karena alasan ekonomi, status gizi masyarakatnya yang ditunjukkan oleh status gizi balitanya, ketersediaan pangan daerah dan kerentanan pangan. Kerawanan pangan dalam penelitian Ratnasari dan Prishardoyo (2009), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kerawanan pangan rumah tangga miskin adalah pendapatan, pendidikan dan kepemilikan aset produktif rumah tangga miskin karena merupakan faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi kemiskinan.

Hasil penelitian Dewan Ketahanan pangan dan *World Food Programme* pada tahun 2005 menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga di Indonesia belum merata. Pemetaan dari 265 Kabupaten di Indonesia terdapat 100 kabupaten yang rawan pangan dan gizi kronis. Penyebab kondisi rawan pangan dan gizi kronis adalah keterbatasan kepemilikan lahan, keterbatasan sumber sumberdaya alam dan pengetahuan serta tenaga kerja manusia, keterbatasan akses permodalan, serta kondisi sarana dan prasarana tidak memadai (Ariani dalam Jamhari, 2011).

Dalam rangka penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan tersebut dilaksanakan kegiatan Program Desa Mandiri Pangan, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Rawan Pangan dengan fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian. Melalui Program Desa Mandiri Pangan diharapkan masyarakat desa rawan pangan akan kembali mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif setiap harinya. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan dan akhirnya tercapai kemandirian masyarakat.

Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan (BKP, 2012). Program Desa Mandiri pangan merupakan program aksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk mengurangi rawan pangan dan gizi melalui pendayagunaan sumberdaya, kelembagaan dan kearifan lokal pedesaan. Program ini melibatkan partisipasi masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam; (1) meningkatkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; (2) meningkatkan distribusi dan akses pangan masyarakat; (3) meningkatkan mutu dan keamanan pangan desa; (4) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan (5) meningkatkan kualitas penanganan masalah pangan (Darwis dan Rusastra, 2011).

Tujuan Program Desa Mandiri Pangan adalah untuk meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi (mengurangi kerawanan pangan dan gizi) masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi. Dalam

pelaksanaannya, Program Desa Mandiri Pangan akan difasilitasi dengan masukan antara lain: instruktur, pendamping dalam bidang manajemen kelompok dan usaha serta teknis, bantuan permodalan, sarana dan prasarana, tenaga kerja serta teknologi. Berbagai masukan tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan seperti pemberdayaan masyarakat (pendampingan, pelatihan, fasilitasi dan penguatan kelembagaan), harmonisasi sistem ketahanan pangan dan pengembangan keamanan pangan serta antisipasi maupun penanggulangan kerawanan pangan.

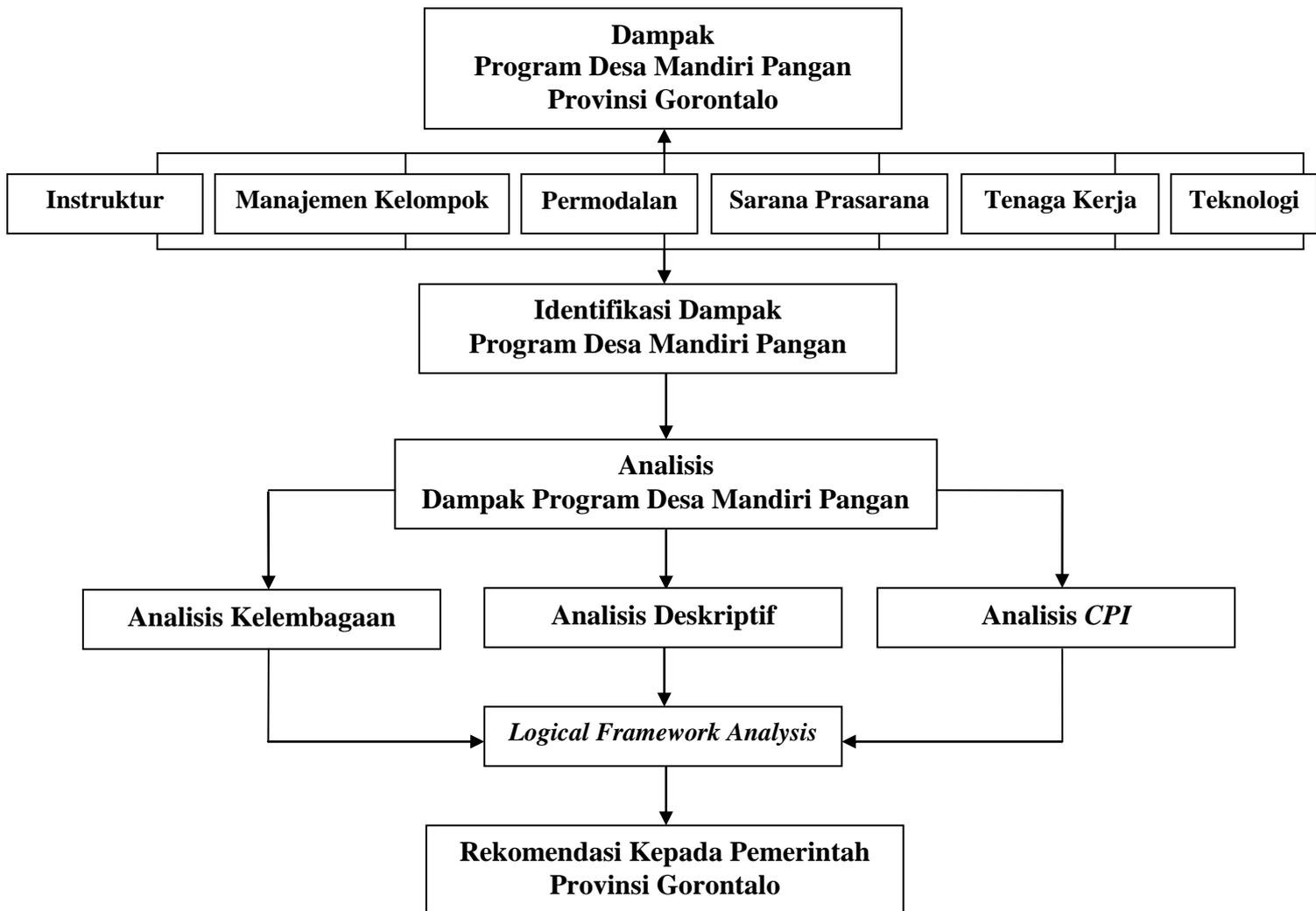
Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan dalam mengelola aspek ketersediaan dan distribusi pangan dengan gizi seimbang dan aman, dan mampu mengatasi masalah pangan serta mampu membentuk aliansi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melawan kelaparan dan kemiskinan, sehingga diharapkan dapat menurunkan kerawanan pangan dan gizi. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program aksi mandiri pangan antara lain melalui: (a) penerapan prinsip pemberdayaan masyarakat, dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menolong dirinya sendiri; (b) penguatan kelembagaan pedesaan dalam membangun ketahanan pangan dan gizi, peningkatan pendapatan, akses dan konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang, sanitasi lingkungan serta antisipasi situasi darurat; (c) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan dukungan multi sektor dan multi disiplin; (d) sinergitas antar *stakeholder* yang diwujudkan melalui peningkatan kemampuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dalam bekerjasama dengan *stakeholder* lain dan memfasilitasi Tim Pangan di tingkat desa.

Pada tahun 2005 pelaksanaan Program Desa mandiri Pangan dilaksanakan di 9 provinsi sebagai *pilot project*, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2006, pelaksanaan kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Proksi Mapan) merupakan tahap persiapan. Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pusat berupa sosialisasi Proksi Mapan kepada 30 propinsi, di Surabaya pada bulan April 2006. Selain itu telah

dilaksanakan pelatihan penyusunan data *base* desa mandiri pangan di Surabaya dan Yogyakarta dengan instruktur dari Badan Pusat Statistik, Jakarta. Materi yang diberikan berupa survei pelaksanaan untuk penyusunan Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) untuk mengetahui jumlah rumah tangga miskin dan Survei Rumah Tangga (SRT) untuk mengetahui potensi. Kegiatan yang telah dilakukan identifikasi lokasi di 122 kabupaten di 30 propinsi. Masing-masing kabupaten ditetapkan 2 desa sebagai pelaksana Proksi Mapan, namun terdapat beberapa kabupaten lebih dari 2 desa. Identifikasi lokasi telah dilakukan oleh kabupaten pelaksana, sebanyak 250 desa. Masing-masing desa terdiri dari 2 pendamping yang berasal dari aparat (penyuluh) dan non aparat (Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat).

## 2.2 Kerangka Berpikir (Bagan Alir Penelitian)

Kerangka berpikir (bagan alir penelitian) Kajian Dampak Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

### BAB III METODE PENELITIAN

### **3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Tepatnya di desa-desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Mandiri Pangan. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan yaitu mulai pada awal bulan Mei sampai dengan akhir bulan Oktober 2012.

### **3.2 Jenis dan Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil pengamatan langsung, melalui *focus group discussion* (FGD), wawancara dan pengisian kuesioner dengan pihak-pihak terkait. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian serta informasi dan studi literatur yang mendukung dari berbagai instansi terkait.

### **3.3 Penarikan Sampel Desa Mandiri Pangan**

Berdasarkan jumlah desa mandiri pangan di Provinsi Gorontalo, hanya ada 5 desa mapan pada tahun 2009 yaitu Desa Sukamaju (Kecamatan, Mootilango, Kabupaten Gorontalo), Desa Batu Keramat (Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo), Desa Dunggala (Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango), Desa Taluduyunu (Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato) dan Desa Libuo (Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato). Sementara itu, sampel desa mapan yang diidentifikasi dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 desa mapan dan desa-desa tersebut terletak di 3 Kabupaten yang berbeda. Adapun desa mapan tersebut berada di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa alat analisis yaitu: analisis deskriptif, analisis kelembagaan, analisis *Comparative Performance Index* (CPI) dan LFA (*Logical Framework Analysis*).

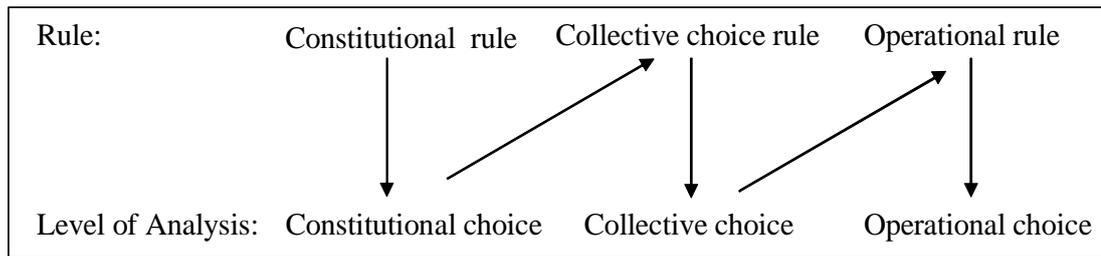
#### **a. Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif adalah suatu analisis yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan karakteristik kondisi ekonomi dan sosial tertentu dari suatu daerah. Beberapa kondisi ekonomi dan sosial yang perlu dideskripsikan misalnya, laju pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, gambaran sektor pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu populasi. Misalnya populasi dilihat dari nilai rata-ratanya (mean, median, modus), standar deviasi, variansi, nilai minimum dan maksimum, kurtosis dan *skewness* (kecurangan distribusi).

Data yang dianalisis dapat berupa data kualitatif atau data kuantitatif. Deskripsi dari kondisi sosial dan ekonomi suatu daerah bisa beragam bentuknya, bisa berupa tabulasi silang, grafik histogram dan sebagainya. Bentuk deskripsi ini dipilih sesuai dengan keperluan analisis agar tujuan penelitian bisa dicapai.

#### **b. Analisis Kelembagaan**

Kelembagaan yang dimaksud dalam konteks ekonomi kelembagaan adalah aturan main yang disepakati dan berlaku dalam suatu tata kelola sumberdaya alam, dalam konteks ini adalah kelembagaan masyarakat di Desa Mandiri Pangan. Untuk menilai efektifitas kelembagaan dengan cara melihat syarat penting tata kelola juga dengan melihat mekanisme pembentukan dan operasionalisasi dari kelembagaan tersebut. Indikator penting untuk melihat mekanisme pembentukan dan operasional kelembagaan lokal dapat merujuk kepada Ostrom (1990) yang skemanya disajikan pada Gambar 2.



**Gambar 2. Level Analisis Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya**

Gambar tersebut menjelaskan bahwa ada tiga level kelembagaan yang harus ada dalam suatu tata keleola sumberdaya alam. Pertama, *operasional rules*, yaitu aturan main keseharian yang bersifat operasional yang mengatur diantaranya akses, teknologi, sanksi, penalti, *rewards*, dan lain-lain. Kedua, *collective choice rules*, yaitu aturan yang mengatur penyusunan atau pembuatan aturan operasional. Singkatnya, bagaimana aturan operasional dibuat, siapa yang membuat dan bagaimana cara membuat diatur dengan *collective choice rules*. Ketiga, *constitutional rules*, yaitu mengatur bagaimana seseorang atau sekelompok orang dapat memiliki hak untuk menduduki posisi *collective choice* sehingga dapat berperan dalam penyusunan *collective choice rules*.

**c. Analisis Comparative Performance Index (CPI)**

Penilaian dampak Program Desa Mandiri Pangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik perbandingan indeks kinerja (*Comparative Performance Index*). Metode *comparative performance index* atau teknik perbandingan indeks kinerja merupakan salah satu teknik pengambilan keputusan berbasis indeks kinerja. Dampak program tersebut dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh instrumen dasar evaluasi (infrastruktur, manajemen kelompok, permodalan, sarana prasarana, tenaga kerja dan teknologi) dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Desa Mandiri Pangan. Menurut Marimin (2011), teknik perbandingan indeks kinerja merupakan indeks gabungan (*Composite Index*) yang dapat digunakan untuk menentukan penilaian atau peringkat dari berbagai alternatif (i) berdasarkan beberapa kriteria (j). Formula yang digunakan dalam teknik CPI adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
A_{ij} &= X_{ij} (\text{min}) \cdot 100 / X_{ij} (\text{min}) \\
A_{(i+1,j)} &= (X_{(i+1,j)}) / X_{ij} (\text{min}) \cdot 100 \\
I_{ij} &= A_{ij} \cdot P_j \\
I_i &= \sum_{j=1}^n (I_{ij})
\end{aligned}$$

Keterangan :

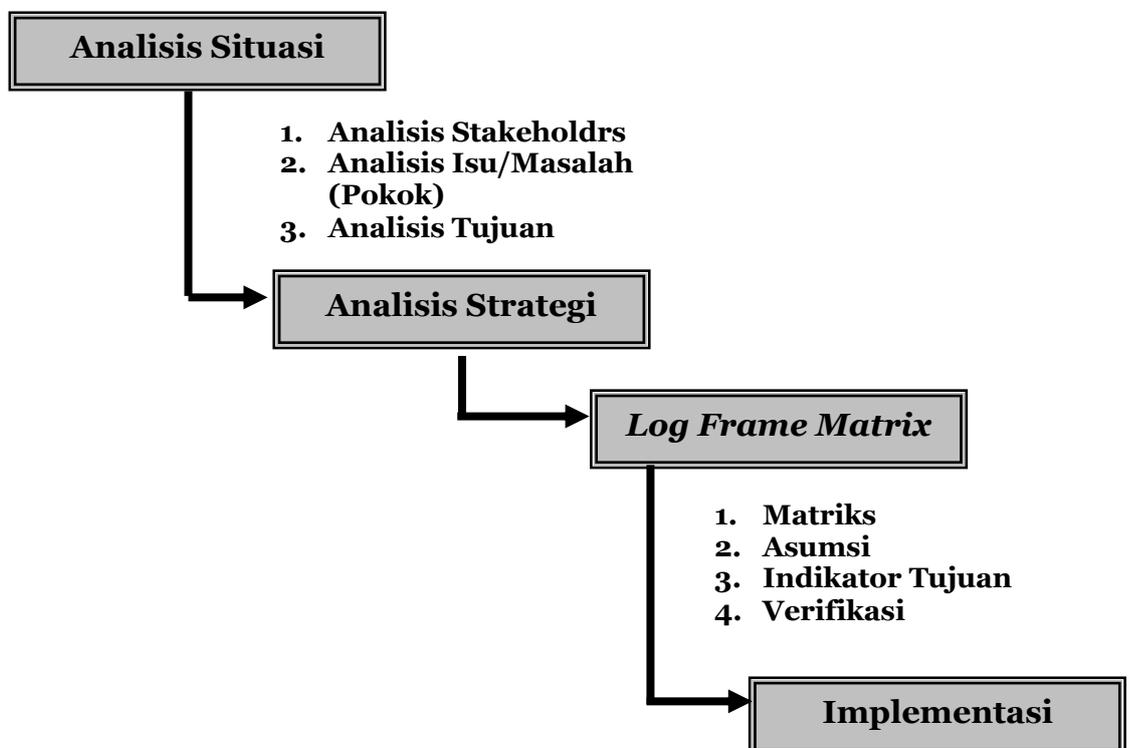
- $A_{ij}$  : nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j  
 $X_{ij}(\text{min})$  : nilai alternatif ke-i pada kriteria awal minimum ke-j  
 $A_{(i+1,j)}$  : nilai alternatif ke-i + 1 pada kriteria ke-j  
 $X_{(i+1,j)}$  : nilai alternatif ke-i + 1 pada kriteria awal ke-j  
 $P_j$  : bobot kepentingan kriteria ke-j  
 $I_{ij}$  : indeks alternatif ke-I  
 $I_i$  : indeks gabungan kriteria pada alternatif ke-I  
 $i$  : 1, 2, 3, ..., n  
 $j$  : 1, 2, 3, ..., m

#### **d. Logical Framework Analysis (LFA)**

Analisis data dalam metode ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif yaitu menguraikan, menganalisis dan mencari hubungan sebab akibat antara isu dan permasalahan yang ditemukan. Dalam metode ini dapat menggunakan instrument *Logical Framework Analysis (LFA)*. *Logical Framework Analysis (LFA)* adalah salah satu alat yang apabila digunakan dengan kreatif akan mampu menjadi petunjuk bagi perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi kegiatan termasuk dalam konteks ini program-program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya. LFA dilakukan untuk melaksanakan program berbasis pada prinsip partisipatif, berorientasi pada tujuan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait.

Langkah awal dari LFA yaitu dengan memetakan isu dan permasalahan-permasalahan yang terkumpul, menentukan struktur keterkaitan hubungan sebab akibat dari isu/permasalahan dan melihat frekuensi hubungan sebab akibat dari masing-masing masalah untuk menentukan isu/masalah yang strategis. Secara diagramatik, proses evaluasi berbasis pada LFA dapat dilihat pada Gambar 3. Bagian terpenting dari proses LFA adalah penyusunan *Logical Frame Matriks*

yang merupakan derivasi dari analisis strategi. Konsep ini disusun berdasarkan analisis keterkaitan antara tujuan, strategi dan faktor eksternal yang ditetapkan melalui asumsi-asumsi sah tentang program kegiatan yang dievaluasi. Proses ini dapat dilakukan di lapangan.



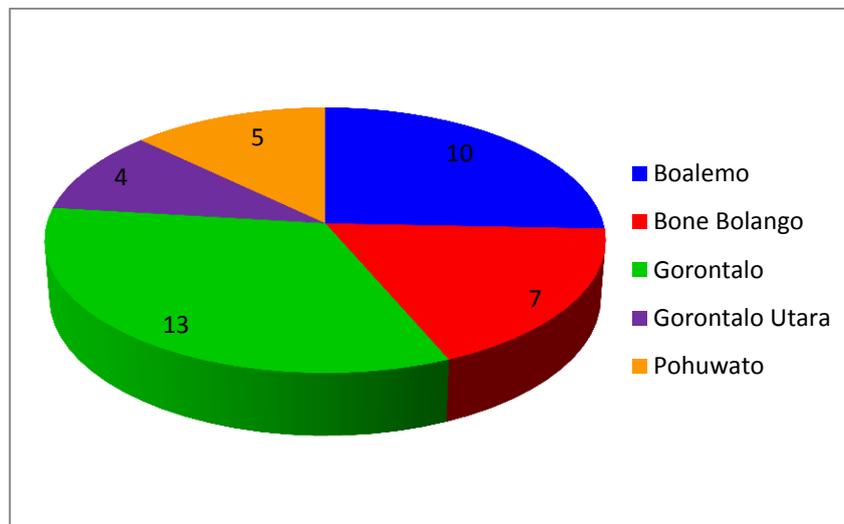
**Gambar 3. Tahap Perencanaan Pengelolaan Berbasis LFA**

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Desa Mandiri Pangan Provinsi Gorontalo

Program desa mandiri pangan (mapan) adalah program nasional yang bertujuan untuk mengatasi kerawanan pangan dan kemiskinan di Indonesia. Pelaksanaan Program Desa Mapan di Provinsi Gorontalo dilaksanakan di desa rawan pangan dengan fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian. Program Desa Mapan di Provinsi Gorontalo sudah berlangsung selama 6 tahun, di mulai pada tahun 2006 hingga sekarang ini tahun 2012. Adapun total jumlah Desa Mapan di Provinsi Gorontalo saat ini yaitu sebanyak 39 desa mapan yang tersebar di 5 wilayah Kabupaten antara lain Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara. Jumlah desa Mapan per Kabupaten di Provinsi Gorontalo dari tahun 2006-2012 dapat dilihat pada Gambar 4.



**Gambar 4. Jumlah Desa Mandiri Pangan Per Kabupaten di Provinsi Gorontalo Tahun 2006-2012**

Berdasarkan Gambar 4 diatas, jumlah Desa Mapan terbesar berada di Kabupaten Gorontalo sebanyak 13 desa, Kabupaten Boalemo sebanyak 10 desa dan Kabupaten Bone Bolango sebanyak 7 desa. Hal tersebut didasarkan pada luas

wilayah administratif dan jumlah penduduk miskin yang cukup besar pada setiap daerah Kabupaten tersebut. Sementara itu, jumlah desa mapan di Kabupaten Pohuwato hanya sebanyak 5 desa dan Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 4 desa. Hal tersebut didasarkan pada jumlah penduduk miskin yang tidak mencukupi standar jumlah kepala keluarga miskin minimal 30 persen dari total jumlah kepala keluarga miskin di desa tersebut.

Secara rinci Desa Mandiri Pangan Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan data pada Tabel 1, sejak awal dilaksanakannya Program Desa Mapan pada tahun 2006 hanya dilaksanakan pada 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo. Pada tahun 2007 Program Desa Mapan sudah mulai berkembang pelaksanaannya pada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Selanjutnya pada tahun 2008 program tersebut dilaksanakan pada 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pada tahun 2009 bertambah menjadi 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato. Pada tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Program Desa Mapan sudah mencakup diseluruh Kabupaten di Provinsi Gorontalo yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara.

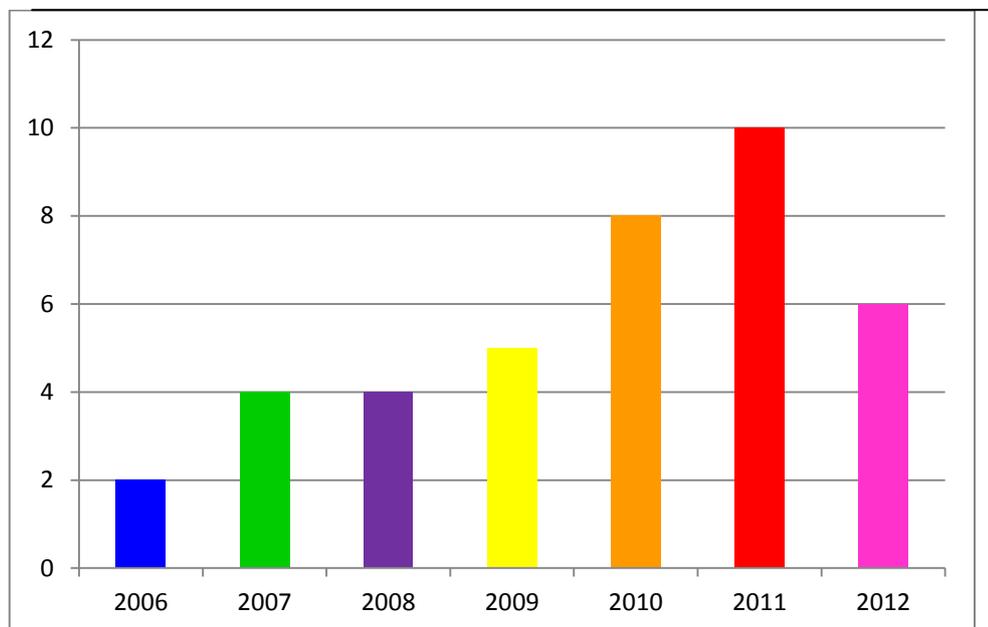
**Tabel 1. Desa Mandiri Pangan Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Gorontalo**

**Tahun 2006 – 2012**

No	Tahun Anggaran	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	2006	Biluhu Tengah	Biluhu	Gorontalo
2		Luluo	Biluhu	Gorontalo
3	2007	Talumopatu	Mootilango	Gorontalo
4		Huyula	Mootilango	Gorontalo
5		Kotaraja	Dulupi	Boalemo
6		Pangi	Dulupi	Boalemo
7	2008	Lamahu	Bilato	Gorontalo
8		Dulangeya	Botumoito	Boalemo
9		Olele	Kabila Bone	Bone Bolango
10		Lonuo	Tilong Kabila	Bone Bolango
11	2009	Sukamaju	Mootilango	Gorontalo
12		Batu Keramat	Paguyaman	Boalemo
13		Dunggala	Tapa	Bone Bolango
14		Taluduyunu	Buntulia	Pohuwato
15		Libuo	Paguat	Pohuwato
16	2010	Lobuto	Biluhu	Gorontalo
17		Lobuto Timur	Biluhu	Gorontalo
18		Buluhi Barat	Biluhu	Gorontalo
19		Dimito	Wonosari	Boalemo
20		Ilomata	Bulango Ulu	Bone Bolango
21		Hutamoputi	Denggilo	Pohuwato
22		Dumolodo	Gentuma Raya	Gorontalo Utara
23		Ipilo	Gentuma Raya	Gorontalo Utara
24	2011	Sidomukti	Mootilango	Gorontalo
25		Satria	Mootilango	Gorontalo
26		Karya Mukti	Mootilango	Gorontalo
27		Polohungo	Dulupi	Boalemo
28		Tanah Putih	Dulupi	Boalemo
29		Tangga Jaya	Dulupi	Boalemo
30		Kuala Lumpur	Paguyaman	Boalemo
31		Tolomato	Suwawa Selatan	Bone Bolango
32		Milangodaa	Popayato Timur	Pohuwato
33		Hiyalooyile	Anggrek	Gorontalo Utara
34	2012	Momala	Bongomeme	Gorontalo
35		Apitalau	Paguyaman Pantai	Boalemo
36		Bulontalangi Timur	Bulango Timur	Bone Bolango
37		Kopi	Bulango Utara	Bone Bolango
38		Ayula	Randangan	Pohuwato
39		Dunu	Sumalata	Gorontalo Utara

**Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Tahun 2012**

Jumlah Program Desa Mandiri Pangan Per Tahun Anggaran di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 5. Berdasarkan data pada Gambar 5, *trend* jumlah Program Desa Mapan per tahun anggaran di Provinsi Gorontalo dari tahun 2006 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hanya pada tahun 2007 dan tahun 2008 jumlah Program Desa Mapan tersebut mengalami *stagnasi*. Namun pada tahun 2012 *trend* jumlah desa mapan tersebut mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah Kabupaten tersebut menganggap desa-desa yang ada di daerahnya sudah memenuhi kriteria mapan.



**Gambar 5. Jumlah Program Desa Mandiri Pangan Per Tahun Anggaran di Provinsi Gorontalo, Tahun 2006 – 2012**

#### **4.2 Identitas Sampel Desa Mandiri Pangan**

Berdasarkan data pada Tabel 1 diatas, hanya ada 5 desa mapan pada tahun 2009 yaitu Desa Sukamaju (Kabupaten Gorontalo), Desa Batu Keramat Kabupaten Boalemo), Desa Dunggala (Kabupaten Bone Bolango), Desa Taluduyunu (Kabupaten Pohuwato) dan Desa Libuo (Kabupaten Pohuwato). Sementara itu, sampel desa mapan yang diidentifikasi dalam penelitian ini hanya

terdiri dari 3 desa mapan dan desa-desa tersebut terletak di 3 Kabupaten yang berbeda. Adapun desa mapan tersebut berada di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango. Desa mapan yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Sampel Penelitian Desa Mandiri Pangan, Tahun 2012**

<b>Desa Mapan</b>	<b>Jumlah Kelompok</b>	<b>Jumlah Anggota Kelompok</b>	<b>Jenis Usaha Kelompok</b>	<b>Kecamatan/ Kabupaten</b>	<b>Potensi Sumberdaya Alam</b>
Sukamaju	8	20-26	Jual beli sarana produksi pertanian dan beras	Mootilango, Gorontalo	Jagung, Padi, Coklat, Tomat, Cabe, Kunyit, Jahe
Batu Keramat	3	20-40	Penggemukan sapi, jual beli jagung	Paguyaman, Boalemo	Jagung, Kelapa, Sapi
Dunggala	10	10	Kue tradisional, Batu bata, kios, Pembuat minyak kelapa, Tukang, Dagang keliling, dan Menjahit.	Tapa, Bone Bolango	Kelapa, Pisang, Jambu mede, Coklat, Ubi, Nenas, Nangka

**Sumber Data : Data Primer (diolah), Tahun 2012**

Pemilihan sampel lokasi pada 3 desa tersebut dilakukan secara sengaja berdasarkan hasil rekomendasi dari *focus group discussion* (FGD) dan *snow ball method*. Adapun FGD yang dilakukan yaitu bersama *stakeholder* terkait antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Boalemo, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango. Selain itu, program mandiri pangan pada ketiga desa tersebut sudah berjalan sejak tahun 2009. Sehingga ketiga desa tersebut saat ini telah mengalami berbagai tahapan mulai dari tahap persiapan pada tahun 2009, tahap penumbuhan pada tahun 2010, tahap pengembangan pada tahun 2011 dan memasuki tahap kemandirian pada tahun 2012. Berikut adalah profil Desa Mapan di Provinsi Gorontalo yang menjadi objek dalam penelitian ini.

### a. Desa Sukamaju

Desa Sukamaju adalah desa definitif yang terletak di Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Luas wilayah Desa Sukamaju termasuk dalam 3 besar di Kecamatan Mootilango yaitu sekitar 21,39 km<sup>2</sup>. Wilayah Desa Sukamaju didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi. Desa Sukamaju terdiri dari 5 dusun dengan total jumlah penduduk sebesar 1.222 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 633 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 589 jiwa. Total jumlah kepala keluarga di Desa Sukamaju yaitu sebesar 303 KK. Jumlah penduduk Desa Sukamaju berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Sukamaju Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pertanian	836	78,1
2	Peternakan	4	0,4
3	Perkebunan	164	15,3
4	Kehutanan	18	1,7
5	Konstruksi	6	0,6
6	Perdagangan	25	2,3
7	Transportasi	3	0,3
8	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	14	1,3
9	Jasa lainnya	1	0,1
Total		1.071	100,0

Sumber Data : BPS Kabupaten Gorontalo (diolah), Tahun 2012

Berdasarkan data pada Tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Sukamaju bekerja di bidang pertanian dan perkebunan yaitu sebanyak 836 jiwa (78,1%) dan 164 jiwa (15,3%). Sedangkan sisanya bekerja di bidang peternakan (0,4%), kehutanan (1,7%), konstruksi (0,6%), perdagangan (2,3%), transportasi (0,3%), pegawai negeri sipil (1,3%) dan jasa lainnya (0,1%). Banyaknya jumlah penduduk Desa Sukamaju yang berprofesi sebagai petani disebabkan karena potensi sumberdaya alam terbesar yang dimiliki oleh Desa Sukamaju antara lain berupa jagung, padi, coklat, tomat, cabe, kunyit dan jahe. Selain itu juga karena wilayah Desa Sukamaju yang sebagian besar didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi menyebabkan tanaman pangan dan perkebunan sangat cocok untuk diusahakan oleh penduduk setempat. Adapun

jumlah penduduk Desa Sukamaju berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Sukamaju Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	600	50,0
2	Sekolah Dasar	431	35,9
3	Sekolah Menengah Pertama	84	7,0
4	Sekolah Menengah Atas	82	6,8
5	Perguruan Tinggi	2	0,2
Total		1.199	100,0

Sumber Data : BPS Kabupaten Gorontalo (diolah), Tahun 2012

Berdasarkan data pada Tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Sukamaju memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah. Sebanyak 600 jiwa (50%) tidak mengenyam pendidikan di sekolah, 431 jiwa (35,9%) tamat sekolah dasar, 84 jiwa (7%) tamat sekolah menengah pertama dan 82 jiwa (6,8%) tamat sekolah menengah atas. Sedangkan yang melanjutkan sampai ke tingkat perguruan tinggi yaitu hanya 2 jiwa (0,2%).

Jumlah fasilitas pendidikan berupa sekolah di Desa Sukamaju masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang sangat minim yaitu sekolah dasar hanya berjumlah 2 unit dan sekolah menengah pertama hanya berjumlah 1 unit. Sedangkan keberadaan sekolah menengah atas tidak tersedia di Desa Sukamaju.

#### **b. Desa Batu Keramat**

Desa Batu Keramat adalah desa definitif yang terletak di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Luas wilayah Desa Batu Keramat sangat kecil yaitu hanya sekitar 3,15 km<sup>2</sup>. Ketinggian wilayah Desa Batu Keramat tergolong cukup tinggi yaitu sebesar 152 meter dari permukaan laut. Wilayah Desa Batu Keramat didominasi oleh daerah pegunungan. Desa Batu Keramat terdiri dari 3

dusun dengan total jumlah penduduk sebesar 875 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 455 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 420 jiwa.

Sebagian besar penduduk Desa Batu Keramat bekerja di bidang pertanian dan peternakan. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar wilayah Desa Batu Keramat merupakan daerah pegunungan sehingga komoditas yang paling sering diusahakan adalah jagung dan kelapa. Selain itu juga, peternakan merupakan salah satu bidang yang paling banyak diusahakan oleh penduduk Desa Batu Keramat yaitu berupa penggemukan sapi bali.

Desa Batu Keramat merupakan desa yang tergolong miskin karena lebih dari 35 persen kepala keluarga berstatus kurang mampu. Sebagian besar penduduk Desa Batu Keramat memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah. Hampir 60 persen penduduk Desa Batu Keramat tidak mengenyam pendidikan di sekolah. Selain itu juga, belum ada penduduk Desa Batu Keramat yang mengenyam pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi.

Jumlah fasilitas pendidikan berupa sekolah di Desa Batu Keramat masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang sangat minim yaitu sekolah dasar hanya berjumlah 1 unit dan sekolah menengah pertama hanya berjumlah 1 unit. Sedangkan keberadaan sekolah menengah atas tidak tersedia di Desa Batu Keramat.

### **c. Desa Dunggala**

Desa Dunggala adalah desa definitif yang terletak di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Luas wilayah Desa Dunggala termasuk dalam 3 besar di Kecamatan Tapa yaitu sekitar 4,01 km<sup>2</sup>. Wilayah Desa Dunggala didominasi oleh dataran rendah dan pegunungan. Desa Dunggala merupakan desa swakarya yang terdiri dari 3 dusun dengan total jumlah penduduk kedua terbesar yaitu 1.305 jiwa. Total jumlah kepala keluarga di Desa Dunggala yaitu sebesar 316 KK. Jumlah penduduk Desa Dunggala berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Dunggala Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pertanian	282	55,8
2	Peternakan	38	7,5
3	Perkebunan	27	5,3
4	Listrik dan Air	2	0,4
5	Konstruksi	1	0,2
6	Perdagangan	29	5,7
7	Transportasi	24	4,8
8	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	55	10,9
9	Pegawai Swasta	9	1,8
10	Jasa lainnya	38	7,5
Total		505	100,0

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango (diolah), Tahun 2012

Berdasarkan data pada Tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Dunggala bekerja di bidang pertanian yaitu sebanyak 282 jiwa (55,8%). Selain itu banyak juga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil yaitu sebanyak 55 jiwa (10,9%). Sedangkan sisanya bekerja di bidang peternakan (7,5%), perkebunan (5,3%), listrik dan air (0,4%), konstruksi (0,2%), perdagangan (5,7%), transportasi (4,8%), pegawai swasta (1,8%) dan jasa lainnya (7,5%). Banyaknya jumlah penduduk Desa Dunggala yang berprofesi sebagai petani disebabkan karena potensi sumberdaya alam terbesar yang dimiliki oleh Desa Dunggala antara lain berupa kelapa, pisang, jambu mede, coklat, ubi, nenas dan nangka. Selain itu juga karena wilayah Desa Dunggala yang sebagian besar didominasi oleh dataran rendah dan pegunungan menyebabkan pertanian tanaman pangan sangat cocok untuk diusahakan oleh penduduk setempat. Adapun jumlah penduduk Desa Dunggala berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Dunggala Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	283	26,2
2	Sekolah Dasar	272	25,1
3	Sekolah Menengah Pertama	252	23,3
4	Sekolah Menengah Atas	251	23,2
5	Perguruan Tinggi	24	2,2
Total		1.082	100,0

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango (diolah), Tahun 2012

Berdasarkan data pada Tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Dunggala memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah. Sebanyak 283 jiwa (26,2%) tidak mengenyam pendidikan di sekolah, 272 jiwa (25,1%) tamat sekolah dasar, 252 jiwa (23,3%) tamat sekolah menengah pertama dan 251 jiwa (23,2%) tamat sekolah menengah atas. Sedangkan yang melanjutkan sampai ke tingkat perguruan tinggi yaitu pendidikan sarjana hanya 24 jiwa (2,2%).

Jumlah fasilitas pendidikan berupa sekolah di Desa Dunggala masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang sangat minim yaitu sekolah dasar hanya berjumlah 1 unit dan sekolah menengah pertama hanya berjumlah 1 unit. Sedangkan keberadaan sekolah menengah atas tidak tersedia di Desa Dunggala.

### **4.3 Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan**

Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo meliputi 4 tahapan pelaksanaan yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian.

#### **a. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan merupakan tahap awal (tahun pertama) Program Desa Mapan yang dilaksanakan dalam waktu 1 tahun dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu :

1. Seleksi lokasi

Seleksi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang desain Program Desa Mapan dan rencana implementasi kegiatan untuk *stakeholders*. Sosialisasi dilaksanakan dengan menggunakan forum Dewan Ketahanan Pangan baik di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, dengan melibatkan aparatur daerah dari instansi terkait, swasta dan tokoh masyarakat desa setempat.

3. Pendampingan

Kegiatan pendampingan meliputi, rekrutmen pendamping, pelatihan pendamping dan pelaksanaan pendampingan.

4. Penyusunan Data Dasar Desa

Penyusunan data dasar desa (*data base*) dilakukan dalam dua tahap, yaitu : pengumpulan Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) dan Survei Rumah Tangga (SRT). Data lain yang dikumpulkan adalah profil desa. *Data base* tersebut selanjutnya digunakan sebagai data dasar untuk penyusunan rencana pembangunan desa mandiri pangan, serta bahan acuan (*bench mark*) dalam pemantauan dan evaluasi.

5. Pelatihan

Program Desa Mapan dilaksanakan melalui pelatihan kepada petugas pendamping/pembina kemitraan, pamong desa, aparatur daerah tingkat propinsi/kabupaten/kecamatan, petani dan pengurus kelembagaan petani. Pelatihan dilaksanakan secara berjenjang di tingkat propinsi dan kabupaten.

6. Pemberdayaan kelompok afinitas

Kelompok afinitas adalah keanggotaan kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan memungkinkan mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.

7. Penyusunan rencana pembangunan Desa Mandiri Pangan Partisipatif

Perencanaan Desa secara Partisipatif adalah suatu penyusunan rencana pembangunan, khususnya ketahanan pangan tingkat desa yang memerlukan pemikiran, imajinasi dan kesanggupan dalam melihat persoalan-persoalan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang dengan pelibatan seluruh *stakeholders* dan inisiatif masyarakat. Upaya membuat hasil perumusan bersama *stakeholders* dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana caranya untuk bisa mencapai tujuan tersebut melalui teknik *participatory rural approach*.

## **b. Tahap Penumbuhan**

Tahap penumbuhan (tahun kedua) dititik beratkan kepada penguatan kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pelayanan masyarakat, antara lain :

### **1. Penumbuhan kelembagaan aparat**

Pemberdayaan penyuluh ; menumbuhkan pemahaman kepada penyuluh tentang pentingnya Program Desa Mapan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu koordinasi terhadap kelembagaan penyuluh, sosialisasi Program Desa Mapan, mengintegrasikan Program Desa Mapan dalam Program Penyuluhan dan memberikan penyuluhan kepada kelompok sasaran.

Aparat yang menangani ketahanan pangan tingkat propinsi dan kabupaten ; menumbuhkan pemahaman kepada aparat yang menangani ketahanan pangan tingkat propinsi dan kabupaten tentang pentingnya Program Desa Mapan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pembinaan bagi aparat pelaksana Program Desa Mapan dan *workshop* hasil pelaksanaan Program Desa Mapan.

### **2. Penguatan kelembagaan masyarakat**

Pemberdayaan kelompok afinitas ; pemberdayaan kelompok afinitas pada tahap penumbuhan dilakukan melalui peningkatan kapasitas para anggota kelompok, baik di bidang organisasi maupun dalam penumbuhan usaha. Kegiatan pemberdayaan kelompok tersebut dilakukan melalui pelatihan oleh aparatur daerah di tingkat kabupaten dan fasilitasi tenaga pendamping.

Pemberdayaan lembaga usaha ekonomi perdesaan ; pemberdayaan lembaga usaha ekonomi perdesaan dilakukan melalui identifikasi dan pengembangan potensi usaha produktif, pemupukan modal usaha, pengembangan potensi usaha kelompok, pelatihan kewirausahaan, teknis, manajemen serta pembinaan kegiatan usaha ekonomi produktif.

3. Pemberdayaan kelembagaan pelayanan

Menumbuhkembangkan kelembagaan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Kelembagaan pelayanan meliputi lembaga pelayanan usaha ekonomi produktif seperti lumbung pangan, koperasi, pasar, perbankan, dan jasa lainnya, serta lembaga pelayanan pangan dan gizi, seperti posyandu, PKK, dasa wisma dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Penumbuhan atau penguatan kelembagaan dilakukan dengan memperkuat organisasi masing-masing kelembagaan sesuai dengan peran dan fungsinya melalui pembenahan administrasi dan mekanisme pelayanan. Fasilitasi dari pemerintah yang dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dengan Program Desa Mapan antara lain yaitu :

1. Pelatihan

Peserta pelatihan terdiri dari kelompok afinitas dan lembaga-lembaga yang telah ada dan berkembang di masyarakat seperti lumbung pangan, kelembagaan pangan lokal dan pekarangan, Koperasi Tani, KUD, Kelompok Tani dan KWT.

2. Pendampingan

Pendampingan dilakukan untuk penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok afinitas, meliputi menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat, membantu masyarakat dalam mengembangkan kelembagaan dan mencari mitra usaha, serta membantu penyuluh pertanian lapangan dalam penerapan teknologi spesifik lokasi dan pengolahan hasil.

3. Perbaikan sarana dan prasarana

*On Farm* terdiri dari irigasi, jalan usaha tani, sarana usaha tani. *Off Farm* terdiri dari sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran, lembaga

pengolahan hasil usaha, lembaga permodalan pedesaan, serta lembaga penunjang, sarana prasarana kesehatan dan fasilitas umum.

4. Penguatan modal usaha

Penguatan modal usaha bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan kelompok dalam mengelola kegiatan dan keuangan bersama, meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengakses permodalan, serta meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengembangkan usaha pertanian dan non pertanian. Adapun prinsip-prinsip dalam penguatan modal usaha yaitu dana penguatan modal usaha bukan merupakan modal yang habis pakai, dana penguatan modal usaha merupakan dana yang harus berkembang dan bergulir di lokasi Desa Mapan.

5. Harmonisasi sistem ketahanan pangan

Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Keberhasilan pembangunan ketiga subsistem ketahanan pangan tersebut, perlu didukung oleh faktor-faktor input berupa sarana prasarana dan kelembagaan dalam kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan, dan sebagainya.

### **c. Tahap Pengembangan**

Tahap pengembangan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun dimulai pada tahun ketiga. Arah pengembangan dilakukan melalui pengembangan kapasitas masing-masing lembaga sesuai dinamika dan peluang yang ada, antara lain seperti :

1. Lembaga masyarakat

Pengembangan dan pemeliharaan prasarana (pengairan, jalan, usaha tani, air bersih, transportasi dan komunikasi di pedesaan), pengembangan dan penerapan teknologi untuk perbaikan produksi (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas), serta pengembangan usaha menuju skala yang mampu

memberikan pendapatan layak secara ekonomi. Pengembangan diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan.

2. Lembaga pelayanan masyarakat

Gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman, serta pengembangan sistem pemantauan, deteksi dan respon dini kerawanan pangan.

**d. Tahap Kemandirian**

Bekerjanya fungsi kelembagaan perdesaan berdasarkan standarisasi organisasi, tertib administrasi dalam pengelolaan modal sebagai landasan untuk mencapai kemandirian. Proses kemandirian masyarakat dilaksanakan pada tahun keempat sampai terwujudnya ketahanan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Proses kemandirian masyarakat desa ditandai dengan meningkatnya peran masyarakat dalam penyediaan dan distribusi pangan, meningkatnya kemampuan kelompok afinitas dalam melakukan kegiatan usaha, meningkatnya kemandirian kelembagaan ketahanan pangan di pedesaan, meningkatnya jaringan kemitraan usaha dan lembaga keuangan/bank, serta meningkatnya peran Tim Pangan Desa sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan.

**Tabel 7. Tahap Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan Di Provinsi Gorontalo**

Tahap Pelaksanaan		Desa Mapan		
		Sukamaju	Batu Keramat	Dunggala
Persiapan	Seleksi lokasi	√	√	√
	Sosialisasi program	√	√	√
	Pendampingan	√	√	√
	Penyusunan Data Dasar Desa	√	√	√
	Pelatihan	√	√	√
	Pemberdayaan kelompok afinitas	√	√	√
	Penyusunan rencana pembangunan Desa Mandiri Pangan Partisipatif	√	√	√

<b>Penumbuhan</b>	Penumbuhan kelembagaan aparat	√	√	√
	Penguatan kelembagaan masyarakat	√	√	√
	Pemberdayaan kelembagaan pelayanan	√	√	√
<b>Pengembangan</b>	Lembaga masyarakat	√	√	√
	Lembaga pelayanan masyarakat	X	X	X
<b>Kemandirian</b>	Standarisasi organisasi	√	√	√
	Tertib administrasi	√	√	√

Sumber Data : Data Primer (diolah), Tahun 2012

Berdasarkan data pada Tabel 7 diatas, seluruh tahapan pelaksanaan Program Desa Mapan telah dilalui oleh ketiga Desa Mapan yaitu Desa Sukamaju, Desa Batu Keramat dan Desa Dunggala. Meskipun saat ini telah memasuki tahun terakhir dari tahapan kemandirian, namun standarisasi organisasi dan tertib administrasi sudah dilaksanakan oleh kelompok-kelompok afinitas pada ketiga Desa Mapan tersebut. Adapun yang menjadi catatan penting dalam tahapan pelaksanaan program tersebut yaitu pada tahap pengembangan berupa lembaga pelayanan masyarakat, belum optimal dilakukan gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman, serta pengembangan sistem pemantauan, deteksi dan respon dini kerawanan pangan di Desa Mapan. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan program hanya terfokus pada proses keberlanjutan usaha dan tingkat pengembalian modal usaha.

#### **4.4 Identifikasi Dampak Program Desa Mandiri Pangan**

Identifikasi dampak program desa mapan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 6 instrumen dasar evaluasi yaitu instruktur, manajemen kelompok, permodalan, sarana prasarana, tenaga kerja dan teknologi. Penggunaan instrumen tersebut berdasarkan tingkat urgensi (kepentingan) dan sangat mudah dalam membantu peneliti untuk mengidentifikasi keberhasilan program desa mapan. Adapun bentuk penilaian terhadap instrumen evaluasi program desa

mapan tersebut menggunakan skala likert. Instrumen dasar evaluasi program desa mapan dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8. Instrumen Dasar Evaluasi Program Desa Mapan, Tahun 2012**

Instrumen	Desa Mandiri Pangan		
	Sukamaju	Batu Keramat	Dunggala
<b>Instruktur</b>	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik
<b>Manajemen Kelompok</b>	Sangat Baik	Kurang Baik	Kurang Baik
<b>Permodalan</b>	Sangat Baik	Kurang Baik	Baik
<b>Sarana Prasarana</b>	Sangat Lengkap	Sangat Lengkap	Sangat Lengkap
<b>Tenaga Kerja</b>	Sangat Baik	Baik	Baik
<b>Teknologi</b>	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada

Sumber Data : Data Primer (diolah), Tahun 2012

Berikut adalah hasil identifikasi dampak program desa mapan yang telah dilakukan di Provinsi Gorontalo, berdasarkan 6 instrumen dasar evaluasi yaitu infrastruktur, manajemen kelompok, permodalan, sarana prasarana, tenaga kerja dan teknologi.

#### **a. Instruktur**

Instruktur adalah salah satu pendukung yang sangat penting dalam keberhasilan Program Desa Mapan. Instruktur bertugas untuk melakukan kegiatan pendampingan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang menerima bantuan. Instruktur Desa Mapan yang ideal adalah penduduk setempat yang selama ini banyak terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di desa. Selain itu juga dari *track record* pendidikannya pun harus mendukung yakni berbasis pertanian serta mempunyai kemampuan untuk memotivasi masyarakat dalam program pendampingan, dan yang lebih penting lagi adalah masyarakat percaya tentang tugas dan kemampuan instruktur tersebut. Instruktur yang ada di Desa Sukamaju dan Desa Dunggala termasuk kedalam kategori sangat baik karena latar belakang pendidikan yang tinggi dan merupakan penduduk asli yang sering melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan di desa tersebut, sehingga sangat

optimal dalam melakukan tugas-tugas pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Sedangkan instruktur yang berada di Desa Batu Keramat termasuk kedalam kategori baik, walau memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi namun bukan merupakan penduduk asli setempat, sehingga kurang optimal dalam melakukan kegiatan pendampingan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

### **b. Manajemen Kelompok**

Proses manajemen dalam suatu kelompok organisasi sangat dibutuhkan untuk mempermudah pengelolaan sumberdaya yang tersedia. Sehingga sumberdaya tersebut dapat terdistribusi dengan baik dan benar sesuai dengan *Standard Operasional Procedur* (SOP) yang telah ditetapkan bersama. Manajemen kelompok yang dimaksud dalam instrumen evaluasi penelitian ini yaitu manajemen kelompok usaha yang dilaksanakan oleh kelompok penerima bantuan program dan teknis dalam menjalankannya. Manajemen kelompok pada Desa Batu Keramat dan Desa Dunggala termasuk dalam kategori kurang baik, karena kurangnya rasa kepemilikan terhadap kelompok usaha yang dibentuk serta keseriusan dalam menekuni usaha yang dilakukan cukup rendah. Hal ini berdampak pada tidak berlanjutnya usaha yang dilakukan oleh kelompok usaha tersebut. Sedangkan manajemen kelompok pada Desa Sukamaju termasuk dalam kategori sangat baik, karena rasa kepemilikan terhadap kelompok usaha dan keseriusan dalam menekuni usaha menyebabkan solidaritas diantara sesama petani cukup tinggi.

### **c. Permodalan**

Program desa mapan memberikan bantuan modal kepada setiap desa rawan pangan sebesar Rp.100 juta. Dana tersebut disalurkan melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD), kemudian diberikan kepada kelompok-kelompok usaha yang dibentuk berdasarkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia. Permodalan yang dimaksud dalam instrumen evaluasi penelitian ini yaitu berupa sistem pengelolaan keuangan dan tingkat pengembalian modal.

Pengelolaan keuangan dan tingkat pengembalian modal di Desa Batu Keramat termasuk kedalam kategori kurang baik. Hal ini disebabkan karena ada kelompok usaha yang usahanya gagal dan tidak dapat mengembalikan modal sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya pengelolaan keuangan dan tingkat pengembalian modal di Desa Dunggala termasuk kedalam kategori baik. Walaupun ada beberapa kelompok usaha yang gagal namun masih dapat mengembalikan modal sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kemudian pengelolaan keuangan dan tingkat pengembalian modal di Desa Sukamaju termasuk kedalam kategori sangat baik. Hal ini disebabkan karena sistem pengelolaan keuangan kelompok usaha selalu diawasi, serta tingkat pengembalian modal pun sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga kelompok usaha dapat berkembang dan berdampak positif bagi masyarakat desa setempat.

#### **d. Sarana Prasarana**

Sarana prasarana sangat dibutuhkan bagi setiap daerah khususnya daerah yang rawan pangan. Sarana prasarana yang memadai dapat menunjang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dan berkembang. Ketersediaan sarana prasarana dapat mempermudah mobilitas masyarakat desa dalam memasarkan hasil-hasil pertanian, mempermudah masyarakat dalam mengakses pangan, serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh teknologi dan informasi yang mendukung inovasi pertanian. Sarana prasarana yang dimaksud dalam instrumen evaluasi penelitian ini yaitu berupa infrastruktur jalan pedesaan, kemudahan akses lokasi pedesaan, instalasi listrik, ketersediaan air bersih, fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan (balai desa) dan transportasi umum. Ketersediaan sarana prasarana yang ada pada ketiga desa tersebut yaitu Desa Sukamaju, Desa Batu Keramat dan Desa Dunggala sudah cukup memadai dan sangat lengkap. Namun infrastruktur jalan pedesaan yang ada di Desa Sukamaju dan Desa Batu Keramat termasuk dalam kategori kurang baik, karena masih banyak yang berlubang dan akses lokasinya pun sedikit sulit untuk dijangkau karena berada di pelosok daerah.

#### **e. Tenaga Kerja**

Didalam bidang ekonomi tenaga kerja merupakan indikator penting bagi terlaksananya program pembangunan. Tenaga kerja yang dimaksud dalam instrumen evaluasi penelitian ini yaitu tingkat penyerapan tenaga kerja dan keberdayaan masyarakat dalam program desa mapan. Tingkat penyerapan tenaga kerja dan keberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju termasuk kedalam kategori sangat baik. Sedangkan di Desa Batu Keramat dan Desa Dunggala tingkat penyerapan tenaga kerja dan keberdayaan masyarakatnya termasuk kedalam kategori baik.

#### **f. Teknologi**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini begitu cepat dan sangat dinamis. Keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dibutuhkan dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan. Teknologi yang dimaksud dalam instrumen evaluasi penelitian ini yaitu penerapan teknologi yang dilakukan kelompok usaha dalam melakukan inovasi produk yang dihasilkan. Penerapan teknologi yang dilakukan kelompok usaha di Desa Batu Keramat cukup inovatif yaitu dengan membuat pakan ternak yang dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ternak sapi. Sedangkan kelompok usaha di Desa Sukamaju dan Desa Dunggala belum menerapkan teknologi pada produk yang dihasilkan.

### **4.5 Penilaian Dampak Program Desa Mandiri Pangan**

Penilaian dampak program desa mapan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik perbandingan indeks kinerja (*Comparative Performance Index*). Dampak program tersebut dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh instrumen dasar evaluasi (infrastruktur, manajemen kelompok, permodalan, sarana prasarana, tenaga kerja dan teknologi) dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat desa mapan. Adapun Matriks Awal Penilaian Dampak Program Desa Mandiri Pangan dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9. Matrkis Awal Penilaian Dampak Program Desa Mapan, Tahun 2012**

No	Desa Mapan	Kriteria					
		INS	MNK	PMD	SPR	TKR	TEK
1	Sukamaju	5	5	5	5	5	1
2	Batu Keramat	4	3	3	5	4	2
3	Dunggala	5	3	4	5	4	1
Bobot Kriteria		0,20	0,15	0,20	0,15	0,15	0,15

Sumber Data : Data Primer (diolah), Tahun 2012

Berdasarkan matriks awal penilaian pada Tabel 9 diatas, kriteria instrumen dasar evaluasi yaitu instruktur dilambangkan dengan INS, manajemen kelompok dilambangkan dengan MNK, permodalan dilambangkan dengan PMD, sarana prasarana dilambangkan dengan SPR, tenaga kerja dilambangkan dengan TKR dan teknologi dilambangkan dengan TEK. Bobot kriteria ditentukan langsung oleh peneliti berdasarkan tingkat kepentingan (urgensi) dari masing-masing instrumen dasar evaluasi. Sementara itu, angka kriteria dari masing-masing instrumen dasar evaluasi ditentukan dengan menggunakan skala likert. Hasil identifikasi kriteria yang dilakukan menunjukkan bahwa setiap instrumen dasar evaluasi memiliki *trend* positif (semakin tinggi nilainya semakin baik). Sehingga nilai minimum pada setiap kriteria instrumen dasar evaluasi ditransformasi ke-100, sedangkan nilai lainnya ditransformasi secara proporsional lebih tinggi. Matriks Hasil Transformasi Teknik Perbandingan Indeks Kinerja Penilaian Dampak Program Desa Mandiri Pangan dapat dilihat pada Tabel 10.

**Tabel 10. Matrkis Hasil Transformasi Teknik Perbandingan Indeks Kinerja Penilaian Dampak Program Desa Mapan, Tahun 2012**

No	Desa Mapan	Kriteria						Nilai	Peringkat
		INS	MNK	PMD	SPR	TKR	TEK		
1	Sukamaju	125	166,7	166,7	100	125	100	132,09	1
2	Batu Keramat	100	100	100	100	100	200	115,00	2
3	Dunggala	125	100	133,3	100	100	100	111,66	3
Bobot Kriteria		0,20	0,15	0,20	0,15	0,15	0,15		

Sumber Data : Data Primer (diolah), Tahun 2012

Berdasarkan matriks hasil transformasi pada Tabel 10 diatas, didapatkan total nilai indeks kinerja dari masing-masing desa mapan berturut-turut yaitu Desa

Sukamaju memiliki nilai indeks kinerja sebesar 132,09, Desa Batu Keramat memiliki nilai indeks kinerja sebesar 115,00 dan Desa Dunggala memiliki nilai indeks kinerja sebesar 111,66. Artinya semakin besar nilai indeks kinerja suatu desa mapan maka semakin besar pula dampak program desa mapan yang dirasakan oleh masyarakat desa tersebut. Apabila dilihat dari besaran nilai indeks kinerjanya, maka Desa Sukamaju, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo berada pada peringkat pertama yang memiliki dampak terbesar dari program desa mapan terhadap masyarakatnya. Setelah itu disusul Desa Batu Keramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo berada pada peringkat kedua yang memiliki dampak program desa mapan terhadap masyarakatnya. Selanjutnya Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango berada pada peringkat ketiga yang memiliki dampak program desa mapan terhadap masyarakatnya.

#### **4.6 Sistem Kelembagaan Desa Mandiri Pangan**

Program Desa Mandiri Pangan, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Rawan Pangan dengan fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian. Dalam pelaksanaannya, Program Desa Mandiri Pangan melibatkan kegiatan lintas sektor, untuk itu perlu dilakukan pengorganisasian sistem kelembagaan secara efektif baik di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Untuk mempertegas fungsi dan peran masing-masing level kelembagaan dapat dijelaskan pada Tabel 11.

**Tabel 11. Fungsi dan Peran Masing-Masing Level Kelembagaan**

<b>No</b>	<b>Level Kelembagaan</b>	<b>Tingkat Kewenangan</b>	<b>Fungsi dan Peran</b>
1	Dewan Ketahanan Pangan	Pusat	Koordinator pelaksana Program Desa Mapan
2	Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan	Pusat, Propinsi, Kabupaten	Penanggung jawab kegiatan dalam Program Aksi Desa Mapan
3	Pokja Desa Mapan	Pusat, Propinsi, Kabupaten	Pelaksana kegiatan Desa Mapan (Pokja ini berada dalam Dewan Ketahanan Pangan)

4	Camat	Kecamatan	Koordinator desa pelaksana Program Desa Mapan
5	Kepala Desa	Desa	Penanggung jawab operasional Program Desa Mapan di tingkat desa
6	Tim Pangan Desa	Desa	Aktor penggerak pembangunan ketahanan pangan di tingkat Desa

**Sumber Data : Data Primer (diolah), Tahun 2012**

Program pengembangan Desa Mapan dirumuskan oleh kelompok kerja yang berfungsi sebagai simpul-simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program aksi secara berjenjang di tingkat desa, kabupaten, propinsi dan pusat.

#### **a. Tingkat Desa**

Tim Pangan Desa terdiri dari 5 orang yaitu aparat desa berjumlah 1 orang, tokoh masyarakat berjumlah 1 orang, perwakilan dari masyarakat khususnya masyarakat miskin berjumlah 2 orang dan Ketua Tim Penggerak PKK berjumlah 1 orang. Tim ini bertugas bersama pendamping untuk merumuskan perencanaan dan menggerakkan pelaksanaan kegiatan hingga pemantauan dan evaluasi. Tim Pangan Desa akan menggantikan peran pendamping, setelah tahapan Program Desa Mapan berakhir. Adapun beberapa tugas dan fungsi Tim Pangan Desa, dibantu oleh pendamping antara lain :

1. Mengenali kondisi, potensi dan masalah ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi, akses dan pemanfaatan pangan maupun situasi dan kondisi gizi masyarakat.
2. Menjalan fungsi pelaporan situasi pangan dan cadangan pangan desa dan perkembangan pelaksanaan Program Desa Mapan di desa dengan formulir yang telah disepakati.
3. Mengintegrasikan berbagai sumberdaya pembangunan di pedesaan.
4. Mengadakan pertemuan Tim Pangan Desa minimal dilaksanakan 2 bulan sekali.

#### **b. Tingkat Kecamatan**

Camat memfasilitasi pelaksanaan Program Desa Mapan di wilayahnya. Adapun tugas dan fungsi Camat dalam Program Desa Mapan yaitu :

1. Mengkoordinasikan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mapan di wilayahnya.
2. Membantu para aparatur daerah propinsi dan kabupaten dalam proses penetapan lokasi Desa Mapan.

### **c. Tingkat Kabupaten**

Kelompok kerja (pokja) pada tingkat kabupaten diketuai oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani masalah ketahanan pangan tingkat Kabupaten dengan anggota dinas-dinas terkait dengan ketahanan pangan, Camat dan bank penyalur. Adapun tugas dan fungsi pokja tingkat kabupaten antara lain :

1. Melaksanakan sosialisasi Program Desa Mapan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam Program Desa Mapan.
3. Melakukan identifikasi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan Program Desa Mapan.
4. Merumuskan Program Pengembangan Desa Mapan di Wilayah Kabupaten.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola Program Desa Mapan di tingkat provinsi dan pusat.
6. Mengadakan pertemuan pokja Desa Mapan ditingkat kabupaten minimal 3 bulan sekali.

### **d. Tingkat Provinsi**

Kelompok kerja (pokja) ditingkat propinsi diketuai oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani masalah Ketahanan Pangan di tingkat Provinsi dengan anggota dinas-dinas lain yang terkait dengan ketahanan pangan. Adapun tugas dan fungsi pokja di tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten.

2. Merumuskan program pengembangan Desa Mapan di wilayah provinsi.
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam Program Desa Mapan.
4. Mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam pelaksanaan Program Desa Mapan.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola Program Desa Mapan di tingkat Pusat.
6. Mengadakan pertemuan pokja Desa Mapan di tingkat provinsi yang dilaksanakan minimal 4 bulan sekali.

#### **e. Tingkat Pusat**

Susunan Organisasi Kelompok Kerja Program Desa Mapan ditingkat pusat diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang anggotanya terdiri dari instansi terkait dengan ketahanan pangan. Berikut adalah tugas dan fungsi pokja di tingkat pusat antara lain :

1. Melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan lembaga terkait dalam pelaksanaan Program Desa Mapan.
2. Merumuskan kebijakan dalam Program Desa Mapan.
3. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Desa Mapan.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan yaitu Menteri Pertanian RI.
5. Mengadakan pertemuan pokja Desa Mapan di tingkat pusat yang dilaksanakan minimal 6 bulan sekali.

Berdasarkan data pada Tabel 12, terdapat 5 level kelembagaan yang berperan mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa. Kelembagaan tersebut sangat berperan dalam pelaksanaan Program Desa Mapan di Provinsi Gorontalo. Bahkan tugas dan fungsi dari setiap level kelembagaan sudah sangat jelas dan komprehensif. Jika dilihat dari *operasional rules*, berupa aturan-aturan yang bersifat operasional yang

mengatur mengenai *rewards* dan *punishment* masih sangat kurang. Kelompok usaha yang memiliki prestasi yang baik dalam menjalankan usaha masih belum diberikan penghargaan, hanya sanksi yang diberikan bagi kelompok usaha yang terlambat dalam melakukan pengembalian modal. Selanjutnya untuk *collective choice rules* dan *constitutional rules* sudah cukup baik, karena dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan. Selain itu juga yang menjadi catatan penting adalah mekanisme dalam melakukan koordinasi dan sinergisitas antar lembaga masih belum optimal dilaksanakan.

**Tabel 12. Kelembagaan Yang Berperan Dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan Di Provinsi Gorontalo**

Kelembagaan Yang Berperan	Desa Mapan		
	Sukamaju	Batu Keramat	Dunggala
Tingkat Pusat	Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI	Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI	Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI
Tingkat Provinsi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo
Tingkat Kabupaten	Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Boalemo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango
Tingkat Kecamatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kantor Kecamatan Mootilango	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kantor Kecamatan Paguyaman	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kantor Kecamatan Tapa
Tingkat Desa	Tim Pangan Desa	Tim Pangan Desa	Tim Pangan Desa
	Lembaga Keuangan Desa	Lembaga Keuangan Desa	Lembaga Keuangan Desa
	Lembaga Swadaya Masyarakat	Lembaga Swadaya Masyarakat	Lembaga Swadaya Masyarakat
	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kelompok Tani
	PKK	PKK	PKK

**Sumber Data : Data Primer (diolah), Tahun 2012**

#### **4.7 Logical Framework Analysis**

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam *logical framework analysis* mengenai “Kajian Dampak Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo” antara lain yaitu analisis situasi, analisis strategi dan *logical frame matrix*.

##### **a. Analisis Situasi**

###### **1. Analisis Stakeholders**

Pihak-pihak yang berperan sebagai *stakeholders* dalam Program Desa Mandiri Pangan ini adalah sebagai berikut :

- **Pemerintah Pusat**

Pemerintah pusat memiliki peranan penting dalam pelaksanaan Program Desa Mapan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan lembaga terkait dalam pelaksanaan Program Desa Mapan, merumuskan kebijakan dalam Program Desa Mapan, serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Desa Mapan. Pemerintah pusat yang dimaksud adalah Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

- **Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah ikut berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan Program Desa Mapan. Pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan sosialisasi, merumuskan program pengembangan Desa Mapan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam Program Desa Mapan, serta mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam pelaksanaan Program Desa Mapan. Pemerintah daerah yang dimaksud antara lain Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi/Kabupaten, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

- Petani/Kelompok Tani/Kelompok Usaha

Petani/kelompok tani/kelompok usaha merupakan pelaku yang menjadi titik tolak keberhasilan dari Program Desa Mapan. Keanggotaan kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan memungkinkan mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Peningkatan kapasitas para anggota kelompok tersebut dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan oleh instruktur pendamping Program Desa Mapan.

- Bank

Bank merupakan salah satu sumber dana yang dapat menunjang keberlangsungan Program Desa Mapan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman dan memberikan investasi kepada klaster bisnis khususnya kelompok usaha yang bergerak dalam bidang pertanian.

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut berperan dalam keberhasilan Program Desa Mapan. Bersama-sama dengan masyarakat LSM dapat mengawal dan mengawasi jalannya Program Desa Mapan. Selain itu juga, LSM dapat memberikan pelatihan dan pencerdasan kepada petani/kelompok tani/kelompok usaha agar berhasil dalam menjalankan usahanya.

## 2. Analisis Masalah

Beberapa penyebab permasalahan yang terdapat pada Desa Mapan adalah sebagai berikut :

- Tingkat pendidikan masyarakat Desa Mapan yang rendah menyebabkan kualitas sumberdaya manusia yang juga sangat rendah.
- Kurangnya pelatihan menyebabkan masyarakat Desa Mapan jarang yang memiliki kemampuan khusus (*soft skill*) dalam pengembangan usaha.
- Keterbatasan modal usaha menyebabkan terbatasnya pengembangan usaha kelompok masyarakat.

- Budaya kerja masyarakat cenderung lambat (malas) menyebabkan produktivitas menjadi rendah.
- Tidak adanya inovasi dan teknologi dalam pengembangan produk menyebabkan usaha kelompok tidak berkembang (stagnasi).
- Mesin dan peralatan produksi yang sangat sederhana menyebabkan kurangnya *value added* produk yang dihasilkan.
- Kegagalan dalam usaha kelompok/gagal panen menyebabkan sulitnya pengembalian modal usaha.

### 3. Analisis Tujuan

Tujuan utama dari Program Desa Mapan adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (mengurangi kerawanan pangan dan gizi) masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan. Artinya, dengan adanya Program Desa Mapan diharapkan masyarakat desa rawan pangan akan kembali mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan, serta tercapainya kemandirian masyarakat. Adapun hasil yang diharapkan adalah ketersediaan modal usaha, adanya kelompok usaha terpadu, sarana prasarana penunjang semakin lengkap dan berkurangnya masyarakat miskin.

#### **b. Analisis Strategi**

Analisis strategi yang dilakukan dalam Program Desa Mapan terdiri dari kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threat*).

##### 1. Kekuatan (*Strength*)

- Wilayah yang luas untuk kegiatan kelompok usaha dan budidaya pertanian
- Potensi sumberdaya alam yang melimpah

- Dukungan pemerintah terhadap Program Desa Mapan
  - Ketersediaan modal bagi setiap kelompok tani/kelompok usaha
  - Pendampingan dan penyuluhan yang diberikan oleh instruktur
2. Kelemahan (*Weakness*)
- Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
  - Keterbatasan teknologi
  - Kurangnya inovasi
  - Strategi pengembangan usaha kurang terencana
  - Kurangnya kesadaran dan rasa kepemilikan dalam berusaha
3. Peluang (*Opportunities*)
- Meningkatkan taraf hidup masyarakat
  - Peluang kerja bagi masyarakat
  - Memberdayakan masyarakat sekitar
  - Akses jalan dan transportasi semakin mudah
  - Sarana prasarana bertambah baik
4. Ancaman (*Threat*)
- Masalah gagal panen
  - Kesulitan dalam pengembalian modal usaha
  - Tidak berlanjutnya usaha
  - Fluktuasi harga
  - Adanya tengkulak/rentenir

**c. Logical Frame Matrix**

Tahap akhir dari penentuan LFA yaitu dengan membuat *logical frame matrix*. Adapun *logical frame matrix* dapat dilihat pada Tabel 13.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

- a. Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo meliputi 4 tahapan pelaksanaan yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian.
- b. Identifikasi dampak program desa mapan yang menggunakan 6 instrumen dasar evaluasi yaitu instruktur, manajemen kelompok, permodalan, sarana prasarana, tenaga kerja dan teknologi serta penilaian terhadap dampak program desa mapan menunjukkan Desa Sukamaju berada pada peringkat pertama yang memiliki dampak terbesar dari program desa mapan terhadap masyarakatnya. Setelah itu disusul Desa Batu Keramat berada pada peringkat kedua yang memiliki dampak program desa mapan terhadap masyarakatnya. Selanjutnya Desa Dunggala, berada pada peringkat ketiga yang memiliki dampak program desa mapan terhadap masyarakatnya.
- c. Sistem kelembagaan desa mandiri pangan di Desa Sukamaju, Desa Batu Keramat, dan Desa Dunggala melibatkan kegiatan lintas sektor yang dimulai dari Tim Pangan Desa, Kepala Desa, Camat, Pokja Desa Mapan, Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan
- d. Dampak program desa mandiri pangan di Provinsi Gorontalo dilihat dari manfaatnya dapat meningkatkan pangan dan gizi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Sedangkan hasil (*outcomes*) yaitu tersedianya modal usaha, sarana dan prasarana semakin lengkap dan berkurangnya masyarakat miskin, dan *output* (keluaran) yang diperoleh adalah strategi pengembangan usaha yang terencana dan peningkatan produktivitas. Serta kegiatan (*activities*) yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan yang intensif,

menjalin kerjasama dengan Universitas, Lembaga Keuangan (Bank) dan swasta

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat disarankan :

- a. Program Desa Mandiri Pangan tetap dilanjutkan untuk mengurangi angka kemiskinan di desa-desa
- b. Pemerintah tetap mengawasi pelaksanaan program desa mapan melalui kelembagaan yang baik serta koordinasi dan sinergisitas dari seluruh *stakeholders* terkait
- c. Agar kebijakan pemerintah yang mendukung dan berpihak kepada masyarakat dilakukan melalui peningkatan SDM masyarakat desa dengan memberikan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan yang intensif serta kemudahan akses usaha bagi masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- BKP RI. 2010. *Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan 2010-2014*. Kementerian Pertanian Jakarta.
- BKP. 2011. *Pedoman Teknis Program Aksi Desa Mandiri Pangan*. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. 2011. Jakarta.
- BKP. 2011. *Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Menuju Gerakan Kemandirian Pangan*. Kementerian Pertanian RI. 2011. Jakarta.
- BKP. 2012. *Pedoman Umum Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat*. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Darwis Valeriana dan Rusastra I.W. 2011. *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sinergi PUAP dengan Desa Mandiri Pangan*. Jurnal : Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 9 No 2 Juni 2011, Halaman 125-142 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian, Bogor
- Jamhari. 2011. *Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah*. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. ISBN 978-979-971-149-3-0
- Marimin dan Maghfiroh N. 2011. *Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Rantai Pasok*. IPB Press. Bogor.
- Ratnasari M dan Priharsdoyo B. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerawanan Pangan Rumah Tangga Miskin Di Desa Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang*. Jurnal Jejak Volume 2 Nomor 2, Halaman 135-143
- Soemarno. 2010. *Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Rumah Tangga Petani*. Tulisan Ilmiah. Jurusan Tanah FPUB.
- Ostrom, E. (1990). *Governing of the common. The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Qorihah, S. N. et. al. 2008. *Analisis Gender Dalam Program Desa Mandiri Pangan, Studi Kasus Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah*. Jurnal : Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia, Halaman 209-234. Agustus 2008.

